

Kritik Kebijakan Gubernur, Kasta NTB & Pokjar UT: Pengiriman Mahasiswa Ke LN Hanya Tameng Semata



<https://www.brilio.net>

JayantaraNews.com, Lombok Tengah

Sejumlah elemen tokoh pemuda dan masyarakat, kritisi sejumlah kebijakan Gubernur NTB Dr H Zulkiflimansyah, terkait pengiriman 'mahasiswa ke Luar negeri dengan menggunakan beasiswa tersebut.

Kali ini, penolakan tersebut datang dari Kasta NTB dan Ketua Pokjar UT Kabupaten Lombok Tengah.

Sementara saat dikonfirmasi JayantaraNews.com, Ketua Kasta NTB Muhanan, SH mengungkapkan, bahwa beberapa kebijakan Gubernur NTB saat ini perlu dikaji ulang, salah satunya terkait pengiriman mahasiswa dengan beasiswa luar negeri (Dana CSR) hanya sebagai tameng semata.

Dan di tahun 2020, guru tidak linier tidak bisa mengajar lagi, karena sudah tertuang melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik, yang sudah berlaku sejak 2009, tapi sampai sekarang belum tuntas dilakukan oleh pemerintah, dengan harapan ke depan, kiprah guru dalam mengajar semakin profesional, ungkapnya.

"Saya melihat, menyaksikan, menganalisa, dan mempelajari, terkait dengan beberapa program kebijakan Pemerintah Provinsi NTB sangatlah jauh dari kemajuan dan peningkatan," ucapnya.

Dan diketahui juga, bahwa saat kampanye, pasangan Zul-Rohmi banyak janji-janji manis tidak sesuai dengan harapan, dan hanyalah bualan semata. Saat ini belum ada program yang real secara langsung menyentuh ke lapisan bawah, atau gress root. Kebijakan pemprov saat ini hanya berefek di tingkat elit atau pejabat saja, cetusnya.

Dan kami melihat kelangsungan pendidikan PNS dan Non PNS di NTB tidak begitu jelas diperhatikan (anak tirikan), namun program beasiswa ke luar negeri tanpa arah tujuan yang jelas, dan hanya sebagai tameng koruptor. Dan program tersebut juga dibiayai dari uang rakyat,

padahal masih banyak masyarakat di pelosok dusun yang anak-anak putus sekolah serta hidup di bawah garis kemiskinan.

Dan program tersebut semata-mata hanya untuk menutupi program Gubernur NTB yang tidak jelas arah kemajuannya secara signifikan sampai saat ini dirasakan langsung ke lapisan masyarakat bawah. ” Kami mengajak Gubernur NTB untuk melihat ke bawah masih banyak guru TK/RA, PAUD dan SD yang belum melinierkan ijazahnya atau tidak sesuai dengan kualifikasi akademiknya, sehingga terancam untuk tidak bisa mengajar lagi,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Pokjar Kabupaten Lombok Tengah Ismail, S.Pd. Ia mengatakan, bahwa program Kebijakan Zul – Rohmi tidak jelas arah dan tujuan. Kami nyatakan Gubernur NTB saat ini terancam gagal memimpin pemerintahan NTB karena sudah hampir satu tahun lebih menjabat sebagai orang nomor satu di Nusa Tenggara Barat, tapi belum ada sama sekali kemajuan secara signifikan dan keberpihakan dalam semua sektor pemerintahan, ekonomi, budaya, politik, pendidikan dan SDM.

Bahkan Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah telah ingkar dan mengkhianati janji-janji saat kampanye dulu untuk membawa Provinsi NTB menuju masa depan yang gemilang, tapi kenyataannya ‘Nol Besar’, sehingga membuat masyarakat NTB menaruh harapan sangat pesimis terhadap kepemimpinan Dr H Zulkieflimansyah, ucapannya dengan nada kesal.

Sementara, Gubernur NTB saat ini hanya mengandalkan dan mengutamakan ‘beasiswa ke luar negeri’ yang nyatanya tidak mempunyai tujuan yang jelas, dan setelah pendidikan selesai menjadi terancam akan menjadi calon-calon pengangguran, karena tidak disiapkan lapangan pekerjaan yang jelas dan tepat paska pulang ke NTB, ungkapnya.

Lanjut, Ketua Pengurus Kelompok Belajar (Pokjar) Universitas Terbuka Kabupaten Lombok Tengah mengatakan, bahwa guru-guru yang sudah lama mengabdikan dan sudah banyak berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tidaklah begitu diperhatikan terkait kelanjutan pendidikan liniernya sesuai dengan Permendikbud tersebut. ” Kami sangatlah merasakan seperti kegelisahan guru-guru ini jika benar-benar akan diterapkan Peraturan Pemerintah tersebut, karena berdasarkan PP, guru dan dosen kalau tidak linier maka akan diberhentikan secara sistem yang berlaku menurut undang-undang guru dan dosen.”

Dan jika Gubernur NTB tidak tanggap serta mengambil sikap, maka ini menjadi bumerang dan malapetaka bagi guru-guru dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, MTS, SMA, SMK, MA/Sederajat dan perguruan tinggi, maka akan menjadi pengangguran yang tanpa arah yang jelas terutama yang statusnya Non PNS atau guru honorer, tegas Ismail.

Oleh karena itu, Pemprov NTB dalam hal ini Gubernur NTB harus cepat mengkaji ulang terkait kebijakannya mengirim secara terus menerus mahasiswa ke luar negeri tanpa melihat serta mempertimbangkan situasi yang terjadi kepada guru yang tidak sesuai tempatnya mengajar dengan ijazah yang mereka miliki atau tidak linier. Dan jumlah guru serta dosen sekitar ratusan ribu, baik yang PNS maupun Non PNS. Bahkan dengan percepatan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah terkait UU Linierisasi terhadap guru dan dosen yang ada di Nusa Tenggara Barat, ucap Ismail tokoh insan akademisi.

” Kami pengurus Pokjar UT Kabupaten Lombok Tengah yang sudah hampir 12 tahun telah membimbing mahasiswa dari kalangan guru TK/RA, PAUD dan SD, merasakan bagaimana

kesulitan yang dirasakan oleh guru-guru kita dibaqah dengan keterbatasan biaya, sementara antusias yang dimiliki oleh guruguru kita sangat tinggi untuk menjalankan peraturan pemerintah tersebut.”

Untuk itu, kami dari Pengurus Pokjar Universitas Terbuka Lombok Tengah, menuntut gubernur NTB;

1. Gubernur NTB Dr H Zulkiefkimansyah segera memperhatikan dan memperjuangkan Pendidikan Linierisasi Guru TK/RA, PAUD dan SD yang PNS dan Non PNS dituntut oleh peraturan pemerintah tentang guru dan dosen untuk dan memiliki ijazah linier bagi guru PAUD, TK/RA, SD, sehingga mereka tidak terancam diberhentikan.
2. Mendesak Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah menstop serta mengkaji dan mempertimbangkan ulang terkait pengiriman mahasiswa ke luar negeri dengan beasiswa dari dana Pemda NTB dan CSR Bank NTB karena tidak mempunyai tujuan yang pasti dan jelas hanya sekedar tameng semata karena Gubernur NTB terancam gagal memimpin Pemerintahan NTB.
3. Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah harus lebih memperhatikan guru dan dosen yang sedang kuliah dan mengejar Standar Linierisasi lebih diutamakan untuk beasiswa.
4. Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah agar lebih berpihak pada SDM guru dan dosen yang sedang mengabdikan kepada kemajuan NTB, ketimbang beasiswa ke luar negeri pake uang rakyat yang tidak jelas, apa out put yang diharapkan dari program tersebut, tutupnya. (Zi JN)

Sumber Berita:

1. <https://www.jayantaranews.com/2019/07/kritik-kebijakan-gubernur-kasta-ntb-pokjar-ut-pengiriman-mahasiswa-ke-ln-hanya-tameng-semata/>
2. <http://www.koranmerah.com/2019/07/09/editorial-khusus-pokjar-kritik-gubernur-zul-soal-pengiriman-mahasiswa-ajukan-4-tuntutan/>

Catatan:

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Linieritas bagi guru bersertifikat pendidik merupakan kesesuaian antara sertifikat pendidik dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru.¹ Penataan linieritas guru bersertifikat pendidik diperuntukkan bagi:

- a. guru kelas;
- b. guru mata pelajaran;
- c. guru Bimbingan dan Konseling/konselor;
- d. guru pendidikan khusus; atau

¹ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1

e. guru Teknologi Informasi dan Komunikasi/guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi.²

Penetapan linieritas bagi guru bersertifikat pendidik dilakukan melalui sistem Data Pokok Pendidikan dengan menggunakan program aplikasi yang dikembangkan.³

² Ibid, Pasal 2

³ Ibid, Pasal 3